



## **WALIKOTA BLITAR**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR : 188/ 955 / HK / 410.010.2 / 2015**

#### **TENTANG**

#### **PENYEMPURNAAN UKURAN KINERJA**

**PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 – 2015**

**WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis – garis besar kebijakan pembangunan daerah telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai penentu arah sasaran dan tujuan pembangunan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ;
  - b. bahwa dari beberapa konsultasi dan koordinasi ke Kementerian PAN dan RB dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dari hasil Asistensi SAKIP maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Ukuran Kinerja Pemerintah Kota Blitar Tahun 2011 - 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penyempurnaan Ukuran Kinerja Pemerintah Kota Blitar;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  - 3. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

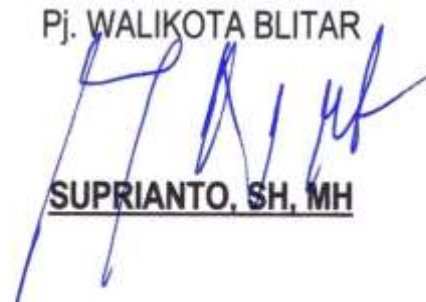
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2011 – 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyempurnakan Ukuran Kinerja Pemerintah Kota Blitar Tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyempurnaan Ukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. memperoleh hasil (out come) pada indikator dan target kinerja yang lebih relevan dan terukur sesuai dengan tujuan serta sasaran strategis;
  - b. memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang lebih relevan dan terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis.
- KETIGA : Penyempurnaan Ukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. menilai dan memperbaiki pelaksanaan program;
  - b. memenuhi kriteria Indikator Kinerja dengan baik ;
  - c. sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, renstra unit kerja, rencana kerja dan anggaran;
  - d. evaluasi kinerja instansi pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 28 September 2015

Pj. WALIKOTA BLITAR  
  
SUPRIANTO, SH, MH



**MATRIKS PENYEMPURNAAN UKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**TAHUN 2011 - 2015**

**VISI                         : Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera yang Berkeadilan, Berwawasan Kebangsaan, dan Religius melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2015**

**MISI                        : 1. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa**

NO	TUJUAN	SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN (SKPD PELAKSANA)
		URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2010	TARGET TAHUN					STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM	
						2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat kota Blitar	Meningkatnya semangat nasionalisme, pelestarian dan pengembangan nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal	Jumlah even budaya khas Kota Blitar  Tingkat partisipasi politik (%)	Capaian jumlah even budaya pada tahun tertentu  Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang aktif dalam pemilu/pilkada pada tahun bersangkutan ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang wajib mengikuti pemilu/pilkada pada tahun bersangkutan	3  70%	3  -	3  -	3  72%	3  72,5%	3  73%	Peningkatan wawasan kebangsaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan  2. Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal  3. Program pengembangan wawasan kebangsaan  4. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan  5. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan  6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat),  7. Program Pendidikan Politik Masyarakat  8. Program Pengembangan Nilai Budaya  9. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulanga n Bencana  2. Satuan Polisi Pamong Praja  3. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata  4. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda  5. Dinas Pendidikan  6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  7. Kecamatan  8. Kelurahan
2.	Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Keagamaan	Rasio tempat ibadah dibanding jumlah penduduk  Prosentase ulusan Siswa SD yang beragama Islam bisa baca Al Qur'an dan rekomendasi dari pemuka agama bagi pemeluk agama lain  Konflik karena agama	Jumlah tempat ibadah ----- Jumlah penduduk  Jumlah lulusan Siswa SD yang beragama Islam bisa baca Al Qur'an/ rekomendasi dari pemuka agama ----- x 100% Jumlah peserta lulusan yang ikut seleksi  Jumlah konflik karena agama	1:333,9  85%  0	1:332  100%  0	1:328  100%  0	1:326  100%  0	1:325  100%  0	1:324  100%  0			
		Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Norma Sosial	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, keindahan, kenyamanan)  Prosentase poskamling aktif	Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan  Jumlah poskamling aktif ----- x 100 % Jumlah seluruh poskamling	70%  61%	72%  62%	74%  62,5%	76%  63%	78%  64%	80%  65%			

**MISI : 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan**

NO	TUJUAN	SASARAN									CARA MENCAPI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN (SKPD PELAKSANA)
		URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2010	TARGET TAHUN					STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM	
						2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan	Rata rata jumlah murid dalam 1 rombel : - SD - SMP - SLTA	Jumlah murid dalam suatu sekolah ----- Jumlah rombel yang ada	26,7 30,7 35,8	26,5 28,9 34	26,3 27,7 33	25,8 26 32	25,4 25,5 31	25 25 30	Peningkatan mutu dan akses pendidikan	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 3. Program Pendidikan Menengah; 4. Program Pendidikan Luar Biasa, 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 7. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sekolah Gratis	Dinas Pendidikan
		Prosentase guru berkualifikasi S-1/D-4 : - SD - SLTP - SLTA	Jumlah guru berkualifikasi S-1/D-4 ----- x 100% Jumlah Guru	69,50% 90,93% 92,1%	72% 92% 92,8%	76% 92,5% 93,5%	81% 93% 94%	85% 94% 94,5%	90% 95% 95%				
		Rasio guru dan murid : - SD - SLTP - SLTA	Jumlah Guru dibandingkan dengan jumlah murid	1:17,36 1:13,38 1:13,73	1:17,35 1:13,35 1:13,70	1:17,30 1:13,30 1:13,68	1:17,00 1:13,10 1:13,60	1:16,00 1:13,00 1:13,55	1:15,00 1:12,5 1:13,50				
		Rata - rata Nilai Ujian Nasional : - SD - SLTP - SLTA	Jumlah nilai ujian nasional semua siswa dibagi jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional	7,50 7,30 7,20	7,60 7,40 7,30	7,70 7,50 7,40	7,80 7,60 7,70	7,90 7,70 7,80	7,90 7,70 7,80				
		Prosentase Kelulusan Ujian Nasional : - SD - SLTP - SLTA	Jumlah siswa yang lulus pendidikan dasar dan menengah dibagi jumlah siswa yang mengikuti UN dikalikan 100 %	99,1% 99,6% 99,23%	99,5% 99,7% 99,40%	99,6% 99,8% 99,6%	99,7% 99,9% 99,80%	99,9% 100% 99,9%	100% 100% 100%				
	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan	Angka partisipasi mumi (APM)  - SD	Jumlah siswa kelompok usia yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t dibagi jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan usia sekolah standar di tingkat pendidikan	120,92	100%	100%	100%	100%	100%				

			<div>- SLTP</div> <div>- SLTA</div>		87,91 109,24	90% 100%	93% 100%	96% 100%	98% 100%	100% 100%		
			Angka putus sekolah	Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat pendidikan dibanding jumlah siswa ditingkat pendidikan tersebut								
			<div>- SD</div> <div>- SLTP</div> <div>- SLTA</div>		0,07% 0,1% 1,41%	0,06% 0,09% 1,01%^	0,05% 0,08% 0,5%	0,03% 0,07% 0,1%	0,01% 0,06% 0,05%	0% 0,05% 0,09%		
2.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka melek huruf (%)	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x 100%	98,2%	98,5%	98,8%	99,1%	99,3%	99,5%		
			Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas <div></div> Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	9,8	9,9	10,0	10,1	10,4	10,5		

**MISI : 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata**

NO	TUJUAN	SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN (SKPD PELAKSANA)
		URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2010	TARGET TAHUN					STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM	
						2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk	Jumlah tenaga medis X 100.000 dibagi jumlah penduduk	91,44	91,44	92,67	93,50	95	100	Peningkatan mutu dan akses kesehatan	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 7. Program Upaya Kesehatan masyarakat 8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; 9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata; 10. Program pengawasan obat dan makanan 11. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Mardi Waluyo 3. Bapemas dan KB
	Rasio posyandu balita per RW		Jumlah posyandu balita dibandingkan dengan jumlah RW	0,85:1	0,87:1	0,90:1	0,93:1	0,97:1	1:1				
	Rasio posyandu lansia per kelurahan		Jumlah posyandu lansia dibandingkan dengan jumlah kelurahan	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1				
	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (%)		Jumlah masyarakat miskin pemegang jamkesmas/jamkesda dibandingkan jumlah masyarakat miskin dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup dijalani yang berhasil mencapai umur x	72,19	72,45	72,70	72,98	73,15	73,29			
			Prevalensi balita gizi kurang (%)	Jumlah balita gizi kurang dibagi jumlah seluruh balita dikalikan 100%	6%	5%	4%	3%	2%	2%			
			Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama kali 1.000	18,5	17,2	16,4	15,3	14,7	13,6			
			Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Jumlah balita usia sampai 59 bulan (bayi+anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu di bagi Jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama di kali 1.000	1,5	1,47	1,44	1,39	0,92	0,91			
			Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu di bagi Jumlah kelahiran Hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama di kali 100.000	51,47	49,16	48,19	46,51	45,98	45,45			

MISI : 4. Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan

NO	TUJUAN	SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN (SKPD PELAKSANA)
		URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2010	TARGET TAHUN					STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM	
						2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Meningkatkan kualitas sistem perekonomian kerakyatan	Meningkatnya Infrastruktur Perekonomian Masyarakat	Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan dikalikan 100%	99,3%	99,7%	99,9%	100%	100%	100%	<b>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Perekonomian</b> <b>2. Penguatan ekonomi kerakyatan</b> <b>3. Penanggulangan kemiskinan</b>	1. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Dinas Perhubungan , komunikasi dan informatika 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 3. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan 4. BAPPEDA 5. Dinas Koperasi dan UKM 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 8. Dinas Kependudukan dan Pencatn Sipil 9. Dinas Pendidikan 10. Dinas Kesehatan
			Prosentase panjang jalan yang diterangi PJU	Panjang jalan yang diterangi PJU dibagi panjang jalan dikalikan 100%	29.78%	30%	32%	34%	36%	40%		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	
			Prosentase jaringan irigasi terhadap luas lahan baku sawah	Luas lahan baku sawah yang terjangkau irigasi dibagi jumlah seluruh luas lahan baku sawah dikalikan 100%	68%	70%	72%	74%	76%	78%		3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	
		Meningkatnya Usaha Ekonomi Kerakyatan	Pertumbuhan PDRB	PDRB tahun t dikurangi PDRB tahun sebelumnya dibagi PDRB tahun sebelumnya	6,32%	6,40%	6,64%	6,79%	6,93%	7,3%		4. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	
			Prosentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif ----- x 100% Jumlah Koperasi	68%	69%	70%	71%	73%	75%		5. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	
2.	Memantapkan penanggulangan kemiskinan yang komprehesif secara terpadu dan partisipatif	Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin tahun 2015 dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk pada tahun 2015 dikali 100%	9,89%	9,80%	8,5%	7%	6%	5%		6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
			IPM	Rata-rata dari jumlah Angka Harapan Hidup ditambah (2/3 Angka Melek Huruf + 1/3 rata-rata lama sekolah) ditambah Indeks konsumsi perkapita yang disesuaikan	77,28	77,80	78,30	79,00	79,79	80,2		7. Program Pembangunan Sarana Prasarana Kota	
												8. Program Pengembangan Sarana Prasarana Kota	
												9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
												10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;	
												11. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	
												12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
												13. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
												14. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
												15. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	
												16. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
												17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	



												18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	
												19. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	
												20. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	
												21. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
												22. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	
												23. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
												24. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
												25. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	
												26. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya	

MISI

: 5. Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif berdasar Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN (SKPD PELAKSANA)
		URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2010	TARGET TAHUN					STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM	
						2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Meningkatkan pembangunan yang partisipatif	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase perempuan dalam lembaga pemerintah	Jumlah pegawai perempuan dalam lembaga pemerintah dibagi jumlah seluruh pegawai dikalikan 100 %	51,54%	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%	1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat  2. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik  3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1. Bapemas dan KB
			Jumlah LPMK aktif	Capaian LPMK aktif dalam tahun tertentu	21	21	21	21	21	21		2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	2. Kecamatan
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Prosentase penduduk wajib KTP yang ber KTP	Jumlah penduduk berKTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%	88,17%	90%	95%	98%	99%	100%		3. Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	3. Kelurahan
			Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan predikat baik	Jumlah SKPD yang menerapkan SAKIP dengan nilai Baik di bagi jumlah SKPD dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	4. BAPPEDA
			Prosentase lembaga pelayanan publik yang mempunyai SPP	Jumlah SKPD pelayanan publik yang menerapkan SPP dibagi jumlah SKPD pelayanan publik dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
												6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6. BPKAD
												7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	7. Inspektorat
												8. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	8. Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika
												9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	9. Bagian Ortala
												10. Program Pembangunan Sarana Prasarana Kota	10. Seluruh SKPD
												11. Program Penataan Administrasi Kependudukan	11. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
												12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
												13. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	13. Badan Lingkungan Hidup
												14. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
												15. Program Optimalisasi	

												Pemanfaatan Teknologi Informasi
												16. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
												17. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
												18. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
												19. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
												20. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
												21. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Pemerintah
												22. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
												23. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
												24. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
												25. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
												26. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
												27. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
												28. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
												29. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

